



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI DINAS PUPR (STUDI KASUS DI
KECAMATAN GUNUNG TOAR) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024**

TIARA ETIKA SARI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Telukkuantan

ABSTRAK

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Pembangunan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data melalui observasi. Diketahui bahwa pemerintah daerah Kecamatan Gunung Toar sudah memenuhi pedoman RPJM. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam hal melakukan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan gunung toar sudah berjalan dengan baik dan sudah di laksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan sesuai yang di inginkan baik itu dari dinas PUPR maupun dari pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan di kecamatan gunung toar dengan baik.

Kata kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur Jalan

ABSTRACT

Development is a benchmark for the development of an area. The regional autonomy that the government has intensified has resulted in most regions throughout Indonesia carrying out development in all sectors, both informal and formal. Development of Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The research method in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interview observation. The results of the research show that the regional government

of Gunung Toar District has fulfilled the RPJM guidelines. This can be seen from the role of local governments in carrying out road construction in accordance with the medium-term development plan (RPJM). The indicators for planning, implementation and supervision of road infrastructure development in Gunung Toar sub-district have been running well and have been implemented in accordance with the planning and objectives as desired by both the PUPR service and the government. Development in Gunung Toar sub-district has been carried out well.



Keywords: Government Role, Road Infrastructure Development

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Salah satunya adalah peningkatan pelayanan transportasi darat berupa pembangunan jalan. Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak berlangsung pembangunan jalan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat. Berbagai masalah yang terjadi di masyarakat muncul berdasarkan sebab dan akibat yang terjadi, tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan daerah. Pertama, tidak konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. kedua, pengelolaan keuangan daerah yang tidak menyeluruh. Hal ini merupakan kecacatan bagi pemerintahan daerah dan menimbulkan ketidakpercayaan ataupun kesenjangan masyarakat terhadap pengelola pemerintahan daerah. Alokasi anggaran menjadi tidak lanjut jika pemerintahan daerah membuat suatu kebijakan yang disusun secara benar dengan skala prioritas tertentu dalam membangun suatu daerah. Melihat realita infrastruktur jalan yang ada di kecamatan Gunung Toar sudah cukup baik dan masih ada jalan yang butuh perbaikan dan pengembangan. Hal ini menuai tanggapan masyarakat sekitar, maupun para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintahan kecamatan Gunung Toar kurang serius dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Penulis beranggapan minimnya sarana infrastruktur jalan menjadikan pelajar mengalami keterlambatan serta kecelakaan yang terjadi. Hal ini menjadi penting ketika para siswa dan siswi ingin mengetahui suatu hal mengenai pelajaran atau pengetahuan lainnya selain dari guru mereka. Maka dengan demikian menjadi penting bagi keberlangsungan pendidikan yang lebih baik, dan hal ini menjadi indikator bagi pemerintahan kecamatan Gunung Toar untuk memperbaiki sarana dan prasarana bagi siswa dan siswi di Kecamatan Gunung Toar. Kecamatan Gunung Toar di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, memiliki luas wilayah sekitar 165,25 km². Informasi spesifik mengenai total panjang jalan di Kecamatan Gunung Toar tidak tersedia dalam sumber yang ada. Namun, terdapat beberapa proyek

pembangunan jalan produksi di desa-desa dalam kecamatan ini, seperti tabel di bawah ini.

Tabel I.1 : Data laporan infrastruktur jalan di kecamatan gunung Toar tahun 2025

Nama Kegiatan	Jumlah Pagu	Nama OPD
----------------------	--------------------	-----------------



	(Rp)	
1.Peningkatan jalan menuju puskesmas rawat inap Kec.gunung toar (170 m)	Rp 600.000.000,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
2.Peningkatan jalan belakang kantor camat Kec.gunung Toar (200 m)	Rp 2.398.840,00	Dinas kebudayaan dan penataan ruang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025

1.Peningkatan jalan menuju puskesmas rawat inap Kec.gunung toar

Peningkatan jalan menuju puskesmas bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan public dan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat gunung toar dapat lebih mudah melalui akses jalan tersebut.

2.Peningkatan jalan belakang kantor camat Kec.gunung Toar (aspal)

Peningkatan jalan di belakang kantor camat bertujuan untuk mempermudah para pegawai kantor untuk pergi ke kantor camat.

Masyarakat mulai menyimpulkan kegagalan pembangunan Infrastruktur jalan, karena adanya indikasi korupsi, kolasi dan nepotisme (KKN) di kalangan pemerintahan baik Kabupaten maupun Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menentukan judul penelitian **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan sebagai kelengkapan menyelesaikan studi Strata satu (S1)



Administrasi Negara, Serta menganalisa permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintahan pemda Kuantan Singingi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori/konsep Administrasi Negara

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber- sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. (Sahya Anggara, 2015:11). Secara harfiah, administrasi berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris) atau *administratie* (bahasa Belanda). Istilah administrasi sebagaimana yang dikenal di Indonesia dewasa ini, berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan Belanda. Setelah ditelusuri istilah ini berasal dari bangsa Romawi. Istilah administratif dari bahasa Belanda mempunyai dua arti. Pertama, menunjuk pada kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam pekerjaan pencatatan, korespondensi, perhitungan, kearsipan dan semacamnya yang lazim dilakukan dalam tugas kesekretariatan atau tata usaha suatu organisasi. Kedua, menunjuk pada penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik (Muhammad, 2019:1). Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama seperti memberikan bahan-bahan, sarana-sarana, instruksi-instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Sahya Anggara, 2016:4).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Sebagai contoh, berikut beberapa definisi organisasi yang dikutip dari beberapa tulisan. (Machmoed Effendhie, 2016:1- 90). Terdapat kutipan pengertian organisasi sebagai berikut. Louis A. Allen :



“Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. Dengan demikian organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas (wujud) sosial yang dikoordinasikan secara sadar oleh sekelompok orang secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai seorang diri. Tujuan organisasi harus merupakan tujuan bersama dari seluruh anggota organisasi, sehingga seluruh anggota organisasi harus saling bahu membahu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan mereka semua. Agar tercapai tujuan yang sama, menjadi penting bagi pengelola organisasi untuk mengajak duduk bersama seluruh anggota untuk merumuskan dan bersepakat menentukan apa yang ingin dicapai organisasi. Membangun tujuan bersama sebagai tujuan organisasi merupakan hal mendasar dan sangat penting bagi eksistensi sebuah organisasi.

2.1.3 Teori / Konsep Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet (dalam Wijayanti, 2019:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner (dalam Wijayanti, 2008:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick (dalam Wijayanti, 2019:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Schein (2019:2) manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (2014:18), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public Policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan menurut Charles O.Jones (2003:3), istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Pemahaman yang diperjelas oleh Richard Rose (2014:7), yakni bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Beberapa definisi diatas merupakan



berbagai macam bentuk dari pemikiran-pemikiran pakar politik, akan tetapi definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Sebagai contohnya pelaku kebijakan yakni kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemiimpin terpilih, dan para analisis kebijakan. Dalam definisi Thomas Dye (2020:17), mengandung makna bahwa: pertama, Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui adanya jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Dengan kata lain semua hal yang pemerintah ketahui termasuk infrastruktur jalan, akan tetapi pemerintah tidak mencanangkan perbaikan jalan pada jalan disuatu wilayah tertentu maka pemerintah sudah membuat kebijakan. Dan sebaliknya jika pemerintah mengetahui dan membuat kebijakan mengenai infrastruktur jalan dan merencanakan perbaikan serta membuat kebijakan untuk diperbaiki, dengan demikian pemerintahpun sudah membuat kebijakan.

2.1.5 Teori/Konsep Pembangunan

Peraturan Menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan Desa/Kelurahan disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya Desa/Kelurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa/Kelurahan. Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas. Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) unruk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan dan pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran dan perluasan wawasan manusia (Rohman, 2017). Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bila itu terkait usaha usaha memajukan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, konsep itu lebih banyak dikaitkan dengan kemajuan material atau ekonomi. Namun, saat ini, konsep pembangunan telah mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih bermultidimensi. Dengan demikian, masalah pembangunan juga harus didekati dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu. Salah satu konsep pembangunan yang sangat populer di Indonesia adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam GBHN 1993, yang mengemukakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seuntuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Konsep



pembangunan ini mengandung arti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau fisik seperti

kecukupan pangan, sandang perumahan, dan kesehatan, tetapi juga aspek batiniah atau non fisik, seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, dan rasa keadilan. Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilaksanakan terhadap suatu usaha atau rangkaian yang sangat penting diperhatikan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus serta perencanaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. 19 Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan itu peran Pemerintahan Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian di atas ditarik kesimpulan peran pemerintah yaitu sebagai pengatur, fungsi, kebijakan di suatu daerah dalam memajukan pertumbuhan maupun ekonomi. Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Peran pemerintah daerah dimaksudkan melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Di Indonesia, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran harus diperjelas sebagai dokumen politik untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas kepada masyarakat diantara kepentingan yang sangat kompleks, kompetitif, dan konfliktual. Anggaran juga mempunyai pengertian sebagai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Dalam proses penganggaran seringkali diwujudkan dalam berbagai cara yang lebih menekankan kepada dimensi politik, kemudian anggaran didistribusikan dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya infrastruktur jalan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pada tingkat Kecamatan pelaksanaan lanjut dari APBD tersebut dibahas melalui Musrenbang Kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang desa/kelurahan.

2.1.7 Teori/Konsep Klasifikasi Jalan

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 bahwa jalan adalah



prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum menurut fungsinya berdasarkan pasal 8 Undang-undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan Didalam pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa fungsi jalan terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang merupakan bagian dari Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran nya sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.





Sumber: Modifikasi peneliti tahun 2025

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan biasanya disusun dalam kalimat pernyataan sementara, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan memahami arah penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan maka perlu di operasionalkan konsep sebagai berikut :

2.4.1 Perencanaan pembangunan

Adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di daerah guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.4.2 Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur

Merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

2.4.3 Pengawasan

Adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

2.4 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Konsep	variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penelitian
		1.Perencanaan	a.Penentuan Program Pembangunan b.Pelaksanaan dengan cepat dan tepat c.Pelaksanaan dengan jaminan biaya	Baik Sangat Baik Cukup Baik Kurang Baik



Analisis	Kebijakan Publik	2.Pelaksanaan	a.Waktu Pelaksanaan	Baik
			b.Alokasi Anggaran	Sangat Baik

			c.Evektivitas	Cukup Baik Kurang Baik
			3.Pengawasan	a.Keterlibatan Masyarakat Baik Sangat Baik b.Pemeliharaan Mutu Bangunan Cukup Baik c.Penilaian Pasca Pembangunan Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti. Sukandarumidi (2021:65). Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis.

Tabel III.1: Informan Penelitian

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Informan	Jumlah	
1	Sekretaris PUPR	1	1	100%
2	Kabid Binamarga	1	1	100%
3	Kasi PMD	1	1	100%
6	Masyarakat	4	4	100%
Total		7	7	100%



3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang di gunakan, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan

oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner yang di teliti dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini masyarakat kecamatan Gunung Toar.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari monografi, literatur, dan buku. Selain itu juga, data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian di lapangan.

3.4 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data, fakta, dan informasi di lapangan, peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2015:166) observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”. Moleong (2016:186).

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumendokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”. Burhan (2014:122).

3.6.4 Triangulasi



Menurut Newman (2020:186) triangulasi adalah mengukur jarak antar objek dengan melakukan pengamatan dari beberapa posisi. Dengan mengamati objek dari beberapa sudut pandang yang berbeda, para surveyor dapat memperoleh objek yang benar.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana Menurut Miles dan Huberman (2017:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna Sujana (dalam Sujarweni, 2014:5). Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2015:255) analisis data meliputi :

3.7.1 Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.7.4 Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Data pokok penelitian ini mengacu pada Pelayanan Publik yang diterima oleh masyarakat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

1 Indikator Perencanaan

Perencanaan pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dengan melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Menganalisis situasi saat ini, dan



mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Kecamatan menyusun perencanaan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada unsur pemerintahan daerah

2 Indikator Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan merupakan sistem perencanaan, suatu sasaran yang diinginkan, sehingga proses perangkuman kegiatan ini memerlukan suatu pengawasan serta pengendalian suatu kegiatan konstruksi yang bertujuan guna mencapai ketelitian. Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu yang dapat membantu proses perencanaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan Pembangunan yang dapat meninjau serta merangkum kegiatan Pelaksanaan dari perencanaan hingga tahapan Pelaksanaan dan perencanaan.

3 Indikator Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

Kesimpulan Dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ataupun analisis penelitian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 dapat di simpulkan bahwa pengawasan, pelaksanaan dan perencanaan sudah termasuk kategori baik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas di ajukan saran sebagai berikut :

- 6.2.1** Diharapkan pihak pemerintah daerah kepada masyarakat agar dapat memberikan kritik dan saran kepada pihak pemerintah daerah terkait pembangunan yang kami laksanakan belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.
- 6.2.2** Masyarakat mengharapkan kepada pemerintah daerah agar terus melaksanakan pembangunan di kabupaten kuantan singingi ini khususnya di kecamatan gunung toar jika ada jalan atau bangunan lainnya yang rusak kami berharap pemerintah sesegera mungkin melakukan perbaikan untuk kenyamanan dan kelancaran kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Akib, K., & Tepare, O. A. (2017). *Peran pemerintah pembangunan infrastruktur*



jalan

- Kessa dan wahyudin, 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*
- Kuncoro, M. (2011). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Akib, K., & Tepare, O. A. (2017). *Peran pemerintah pembangunan infrastruktur jalan..*
- Adamy Marbawi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Aceh. Unimal Pres.
- Anggra Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Edison, dkk. 2016. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kadarisman, 2012. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: PT.Gravindo Persada
- Simbolon, 2021, *Kerbijakan pemerintah daerah*
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barata, A. A. (2015). *Dasar - Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Ellex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Indrawan, R & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. 2010. *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.

Lijak Poltak Sinambela, 2006. *Pengertian Partisipasi*, Bandung : Gramedia
Nurcholis, Hanif, 2011. *Tanggung Jawab Kepala Desa dan Hubungan antara Partisipasi* Dan, Jakarta : Karya Dharma IIP

Moekijat, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia
Indonesia. Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.

Lhoseumawe:
Unimal pres

Mujanah, Siti, 2019. *Manajemen Kompensasi*. Surabaya: CV. Putra Media

Simarora Henry. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: SIE
YKPN

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung

Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*, PT. Rajagrafindo
Persada: Jakarta-14240.

Wukir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*.
Yogyakarta: Multi Presindo

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah